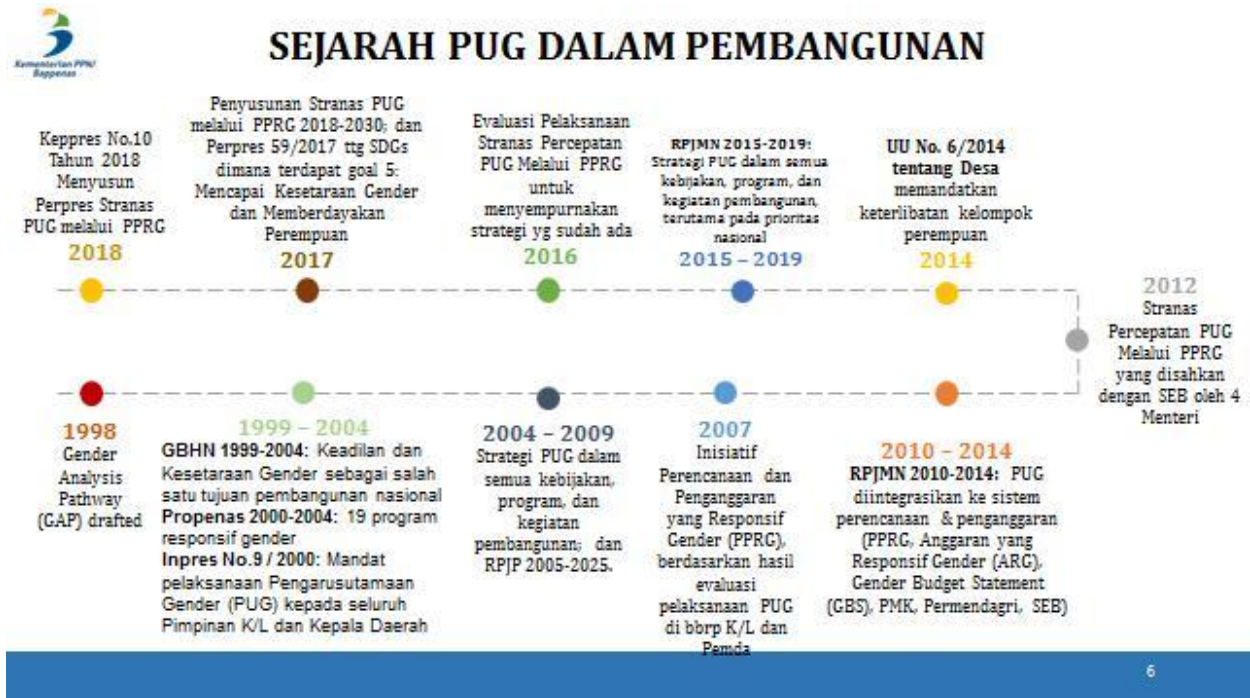


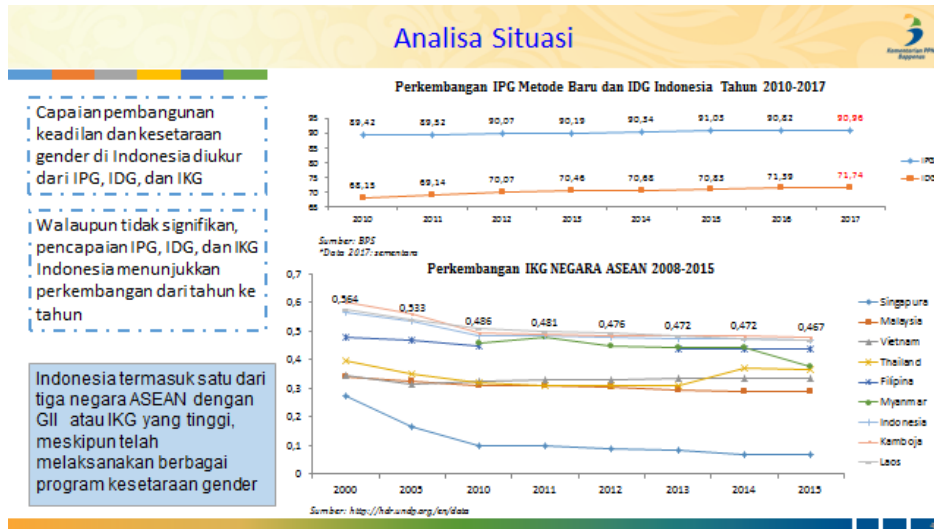
1. Pak Bandi, ternyata relasi kuasa mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pemberdayaan perempuan. Kita semua tahu bahwa agenda pemberdayaan perempuan mutlak perlu dukungan pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan di semua lini. Ini merupakan cara negara untuk hadir dan memastikan bahwa tidak satu orang pun ditinggalkan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. **Pertanyaan saya, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan seperti apa hasilnya?**

- Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal dalam mengakselerasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini dimulai dari penyusunan *Gender Analysis Pathway (GAP)* pada tahun 1998 sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu gender di berbagai bidang pembangunan.
- Sejak tahun 1999 Keadilan dan Kesetaraan Gender telah menjadi tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN 1999-2004. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 yang memandatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada seluruh Pimpinan K/L dan Kepala Daerah.
- Selanjutnya, PUG ini masuk ke dalam semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang diturunkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2025. Dokumen perencanaan nasional ini merupakan dokumen rujukan bagi K/L dan Daerah dalam menyusun perencanaan mereka sehingga dengan memasukan PUG ini, K/L dan Daerah akan menerjemahkan PUG dalam kebijakan, program, dan kegiatan mereka.
- Kemudian pada tahun 2012, untuk mempercepat pelaksanaan PUG, disusunlah Strategi Nasional (Stranas) Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang disahkan melalui Surat Edara Bersama dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penggerak PUG.
- Tidak cukup sampai di situ, berkaca dari pelaksanaan Stranas PPRG dari tahun 2012, Pemerintah saat ini sedang menyusun Stranas PPRG yang baru dan akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden karena dirasa Inpres saja belum cukup untuk mempercepat PUG.

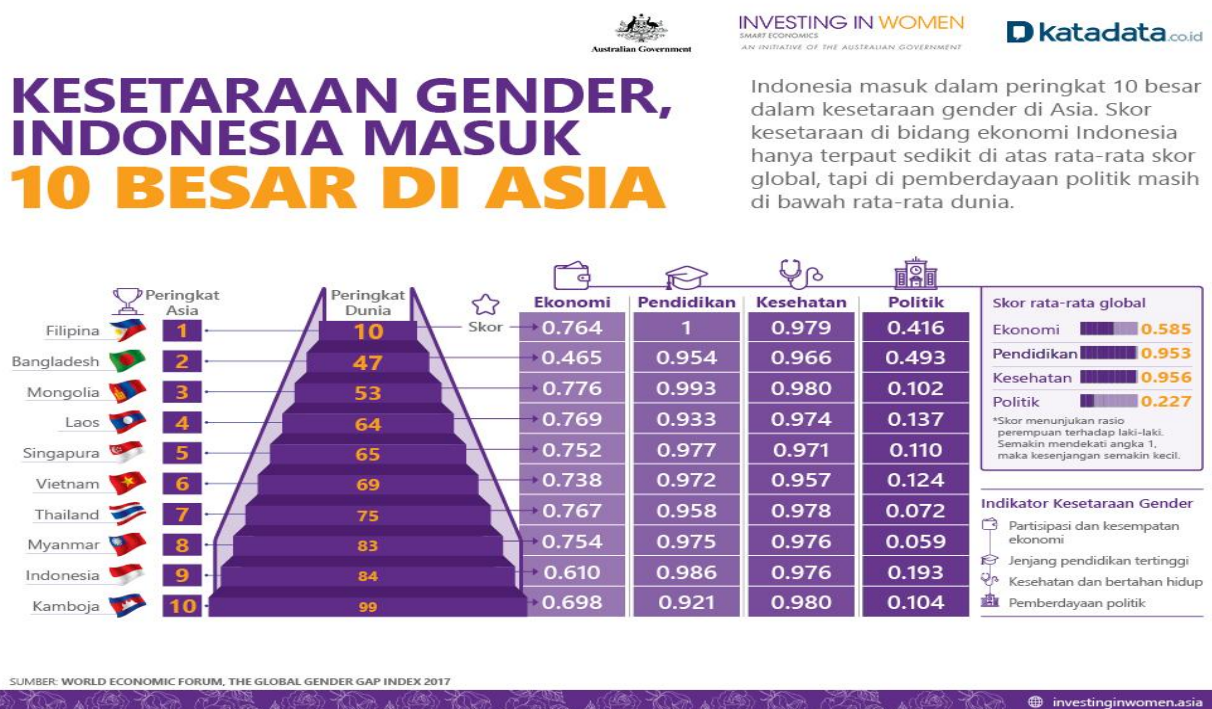
Perpres ini harapannya lebih kuat dalam menjadi rujukan Pemerintah baik di tingkat Pusat, Daerah, maupun di tingkat Desa dalam pelaksanaan PUG dan PPRG. Oleh karenanya, Tujuan Pembangunan Nasional yaitu Terwujudnya Keadilan dan Kestaraan Gender pada tahun 2025 dapat tercapai.



- Hasil yang dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 IPG mencapai 90,96, IDG 71,74, dan IKG 0,47 tahun 2015.



- Berdasarkan *World Economic Forum, The Global Gender Gap Index* pada 2017, Indonesia berada di peringkat 9 sebagai negara dengan skor kesetaraan gender tertinggi di Asia.



SUMBER: WORLD ECONOMIC FORUM, THE GLOBAL GENDER GAP INDEX 2017

investinginwomen.asia

- Pak Bandi, tadi itu tantangan yang dihadapi para perempuan pengusaha di Indonesia. Kita juga ingin tahu apa sebenarnya tantangan yang dihadapi dari sisi pemerintah.

- Seringkali kita menghadapi kenyataan **bahwa tidak mudah untuk menyatukan kepentingan sektoral yang bervariasi, sementara,**

untuk mencapai pembangunan yang efektif perlu kerjasama yang solid. Bagaimana menurut pak Bandi?

- **Apa yang pak Bandi lihat terkait keterlibatan masyarakat sipil dalam pembangunan selama ini?**
- Benar sekali Saudari Pritta Laura, tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang efektif khususnya dalam mencapai kesetaraan gender adalah meyakinkan sektor-sektor terkait bahwasanya pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan isu bersama yang harus dikerjakan bersama-sama. Koordinasi merupakan kata yang mudah diucapkan, namun banyak tantangan dalam menjalankannya. Meskipun demikian, Pemerintah selalu berusaha untuk berkoordinasi antar K/L, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, serta melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) sejalan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu *no one left behind*.
- Kami pun sebagai Pemerintah menyadari bahwa pencapaian tujuan pembangunan nasional dan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa kerjasama yang solid dari berbagai sektor.
- Sejak awal pelaksanaan SDGs di Indonesia sudah melibatkan dan berkoordinasi secara intensif dengan empat platform antara lain Kementerian/Lembaga, filantropi dan pelaku usaha, akademisi serta organisasi masyarakat dan media.
- Salah satu kerjasama yang dilakukan Pemerintah dengan OMS adalah melalui Program MAMPU, yaitu program Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil khususnya Organisasi-organisasi perempuan di akar rumput untuk menyuarakan isu-isu gender dan melibatkan perempuan di akar rumput dalam seluruh proses pembangunan.
- Beberapa praktik baik dari program MAMPU selain yang telah dijelaskan sebelumnya pada sesi *TedTalk* yaitu Reses Partisipatif dan Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan ini telah direplikasi oleh KPPPA dalam bentuk uji coba di Provinsi Papua. Hasilnya cukup menggembirakan dimana perempuan yang akan diberdayakan dari sisi ekonomi ternyata lebih mudah dan cepat setelah mereka mengikuti sekolah perempuan terlebih dahulu. Selain itu, ada juga Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang telah direplikasi menjadi program nasional dengan nama Desa Migran Produktif (Desmigratif)

oleh Kementerian Tenaga Kerja. Praktik baik lainnya adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKtP) yang menjadi Prioritas Nasional pada tahun 2019, serta KLIK PEKKA di bawah koordinasi oleh Ibu Nani.

- Diharapkan kerjasama antara Pemerintah dan OMS terus dapat berjalan dengan solid baik di tingkat pusat, daerah, dan desa.
3. Dari kacamata pemerintah, bagaimana pemberdayaan perempuan dapat mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan sejauh mana strategi pengarusutamaan gender berperan di dalamnya?
- Perempuan merupakan sumberdaya potensial yang memiliki peran penting dalam bidang pembangunan. Perempuan yang memiliki kualitas hidup yang baik dan berdaya akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat luas.
 - Meskipun potensi perempuan yang tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, kondisi perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki di berbagai bidang pembangunan.
 - Contohnya berdasarkan data Sakernas Agustus 2018 bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 51,88 sedangkan laki-laki sudah mencapai 82,69 di tahun yang sama. Padahal jika TPAK perempuan dinaikkan menjadi 64% (sama seperti Thailand), maka akan terdapat 20 juta angkatan kerja *semi-skilled* dan *skilled* baru yang akan meningkatkan daya saing efisiensi pasar kerja Indonesia.
 - Contoh lainnya adalah hasil Kajian Pengeluaran Publik Desa (Bank Dunia, 2016), menunjukkan pemanfaatan dana desa tanpa melibatkan perempuan menyebabkan dana desa hanya berfokus pada administrasi dan infrastruktur, sementara pemanfaatan dana untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi desa sangat kecil. Dengan adanya partisipasi perempuan, perempuan dapat menyampaikan kebutuhan mereka yang biasanya sangat terkait dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarganya serta kebutuhan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan dapat menurunkan kemiskinan multidimensi.
 - Di sinilah pentingnya strategi PUG berperan untuk menyadarkan bahwa adanya isu gender di masing-masing sektor dan bidang pembangunan sehingga dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

- Melalui strategi PUG, dapat diidentifikasi bahwa salah satu yang menyebabkan rendahnya TPAK perempuan adalah masih kurangnya layanan pengasuhan anak baik di perdesaan dan perkotaan sehingga perempuan yang telah memiliki anak cenderung memilih berhenti bekerja. Oleh karenanya, beberapa kantor pemerintahan dan swasta membuat kebijakan untuk penyediaan tempat layanan pengasuhan anak sehingga perempuan bisa tetap bekerja dan mempercayakan anaknya di tempat layanan kantor mereka. Selain itu, perlu dijadikan pertimbangan pula adanya transportasi ataupun sarana publik yang ramah perempuan, sehingga perempuan akan merasa aman dan nyaman jika harus keluar rumah untuk bekerja.
- Jadi semakin banyak bidang pembangunan yang melaksanakan strategi PUG, maka semakin banyak pula isu gender yang dapat diidentifikasi dan di-*address*. Sejalan dengan itu, pemberdayaan perempuan pun akan semakin masif dilakukan karena memang kondisi perempuan di Indonesia masih *lag behind* dibandingkan laki-laki di beberapa sektor.